

Metodologi Perbandingan Pemerintahan

Dr. rer.pol. Mada Sukmajati
Muhammad Mahsun, S.I.P., M.Si.



PENDAHULUAN

Perbandingan pemerintahan merupakan salah satu wilayah kajian yang sangat penting dan menarik di dalam ilmu pemerintahan. Setiap negara memiliki bentuk pemerintahan sendiri yang membuatnya sama atau berbeda dengan negara yang lain. Setiap negara juga memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan negara lain. Termasuk di dalam sistem pemerintahan ini adalah bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga pemerintahan yang ada, fungsi dari lembaga-lembaga tersebut, dan tata kelola yang mengatur hubungan antarlembaga pemerintahan yang ada.

Tata kelola pemerintahan di suatu negara bertujuan untuk melaksanakan fungsi dasar pemerintah. Secara umum, fungsi pemerintah yang paling mendasar adalah melayani kepentingan rakyat. Fungsi yang mendasar ini kemudian diterjemahkan lebih lanjut ke dalam lima fungsi berikutnya, yaitu mengusahakan pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar (keamanan eksternal), melaksanakan ketertiban dalam rangka mencapai tujuan bersama (ketertiban internal), mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan, dan menjamin kebebasan atau hak asasi manusia (Merriam, 1945).

Setidaknya, terdapat dua cara dalam studi perbandingan pemerintahan. *Pertama*, perbandingan pemerintahan yang didasarkan pada sistem pemerintahan yang dianut oleh sebuah negara. Secara umum, terdapat tiga sistem pemerintahan yang dianut oleh semua negara di dunia ini, yakni sistem pemerintahan presidensial (misalnya, Indonesia, Filipina, Amerika Serikat), sistem pemerintahan parlementer (misalnya, Inggris, Jepang, dan Malaysia) dan sistem pemerintahan semipresidensial atau yang kita kenal sebagai sistem pemerintahan campuran (misalnya, Prancis dan Belgia). *Kedua*, perbandingan pemerintahan yang berdasarkan pada kewilayahan atau regional, misalnya

perbandingan negara-negara di kawasan Eropa, perbandingan negara-negara di kawasan Asia Timur, dan perbandingan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Secara sepintas kita dapat melihat bahwa beberapa negara memiliki bentuk pemerintahan yang berbeda. Kita juga dapat melihat bahwa beberapa negara memiliki satu sistem pemerintahan yang sama. Jika lebih teliti, kita dapat melihat berbagai kesamaan pada negara-negara yang sebenarnya memiliki bentuk pemerintahan yang berbeda. Kita juga dapat melihat berbagai keunikan dalam negara-negara yang memiliki bentuk pemerintahan yang sama. Hal ini karena bentuk pemerintahan yang ada di sebuah negara sangat ditentukan oleh berbagai faktor, seperti latar belakang sejarah, sistem ekonomi, dan sistem sosial serta sistem budaya.

Membandingkan bentuk pemerintahan dari satu negara ke negara yang lain menjadi sangat penting, tidak saja bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan, namun juga bagi khalayak umum. Mengapa studi perbandingan pemerintahan menjadi sangat penting? Ada beberapa alasan yang menjelaskan hal ini. *Pertama*, dengan mempelajari perbandingan pemerintahan, kita memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai bentuk pemerintahan yang ada di dunia ini. Dengan demikian, kita tidak hanya terpaku pada pemahaman tentang bentuk pemerintahan di negara kita sendiri. *Kedua*, seperti telah disinggung sebelumnya, dengan mempelajari perbandingan pemerintahan, kita dapat memahami persamaan dan perbedaan dari bentuk pemerintahan di berbagai negara.

Studi perbandingan pemerintahan sebenarnya bermula setelah Perang Dunia II. Pengalaman selama perang telah memberikan pelajaran bahwa setiap negara perlu untuk mempelajari negara lain dalam rangka memahami sikap dan perilaku negara lain. Puncak dari perkembangan studi perbandingan pemerintahan adalah pada era Perang Dingin tahun 1960-an yang saat itu melibatkan rivalitas antara dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Saat itu, studi-studi kawasan sangat didorong oleh pemerintah di kedua negara tersebut dalam rangka mengembangkan atau membendung pengaruh ideologi kanan (ideologi liberalis-kapitalis) dan ideologi kiri (ideologi sosial-komunis). Banyak mahasiswa di kedua negara tersebut yang sangat antusias belajar tentang bentuk pemerintahan di berbagai kawasan, misalnya di kawasan Asia Tenggara (Anderson, 1998).

Pada era modernisasi dan globalisasi saat ini, studi perbandingan pemerintahan dirasakan menjadi semakin penting. Hal ini terkait dengan

optimalisasi dari kepentingan nasional dari masing-masing negara. Dengan kata lain, agar kita dapat mengambil keuntungan dari modernisasi dan globalisasi, kita perlu memahami karakter dasar dari bentuk pemerintahan negara-negara lain. Tanpa pemahaman tersebut, kita hanya akan menjadi objek sehingga tidak dapat mengambil keuntungan pada era modernisasi dan globalisasi saat ini.

Untuk memulai studi perbandingan pemerintahan, pada Modul 1 ini kita akan memberi penekanan pada dua tema pokok, yaitu studi perbandingan pemerintahan (*study of comparative government*) dan metode perbandingan (*comparative method*). Tema yang pertama terkait dengan teori dan konsep dalam studi perbandingan pemerintahan. Termasuk di dalamnya adalah uraian tentang relasi antara studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik karena keduanya sering kali dipahami secara tumpang-tindih. Selain itu, dalam tema pertama ini, kita juga mempelajari ruang lingkup dan tujuan perbandingan pemerintahan. Sementara itu, tema kedua terkait dengan metode dalam perbandingan pemerintahan. Dalam tema ini, kita akan membahas langkah-langkah ilmiah dalam melakukan studi perbandingan pemerintahan.

Dengan demikian, setelah mempelajari Modul 1 ini, kita akan dapat memahami metodologi (teori, konsep, dan metode) dalam studi perbandingan pemerintahan secara komprehensif yang meliputi

1. pengertian perbandingan pemerintahan,
2. ruang lingkup perbandingan pemerintahan (termasuk relasi antara studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik),
3. tujuan perbandingan pemerintahan,
4. metode perbandingan pemerintahan.

KEGIATAN BELAJAR 1

Pengertian, Ruang Lingkup, dan Tujuan Perbandingan Pemerintahan

A. PENGERTIAN

Istilah *perbandingan pemerintahan* (*comparative government*) berasal dari dua kata, yakni *perbandingan* dan *pemerintahan*. Secara terminologis, kata *perbandingan* bermakna tindakan untuk melakukan perbandingan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain (*compare with*) atau tindakan untuk menemukan sesuatu dengan cara melakukan perbandingan (*finding comparison*). Kata *perbandingan* identik dengan dengan upaya untuk melihat persamaan dan perbedaan disertai dengan pertimbangan. Sedangkan kata *pemerintahan*

berasal dari kata *perintah*. Sebelum mendiskusikan definisi “pemerintahan”, kita perlu terlebih dahulu

“Pemerintah tidak dapat dipahami secara terpisah dari masyarakat di mana ia memerintah. Pemerintah beroperasi dalam sistem politik, jaringan hubungan yang biasa melibatkan partai, pemilu, kelompok penekan dan media massa, di mana pemerintah dapat merespon tekanan publik dan melakukan kontrol politik” (Heywood, 2004: 66).

membedakan istilah tersebut dengan istilah *negara* dan *rezim*.

Menurut Stepan (dalam Budiman, 1997), *negara* merupakan sistem administratif, legal, dan koersif (penggunaan paksaan dan kekerasan) yang bertujuan untuk mengelola aparat negara, menyusun relasi antara masyarakat dan pemerintahan, dan menyusun relasi dasar antara masyarakat sipil dan masyarakat politik. Sedangkan pengertian *rezim* merujuk pada prinsip-prinsip, norma-norma, aturan, dan prosedur dalam pengambilan keputusan yang berlaku di sebuah negara.

Banyak ilmuwan politik telah memberikan penjelasan tentang istilah *pemerintah* dan *pemerintahan*. Menurut Pamuji (1985: 3), istilah *pemerintahan* setidaknya memiliki tiga makna, yaitu

1. perintah, yaitu perkataan yang bermaksud menyerukan untuk melakukan sesuatu;
2. pemerintah, yaitu kekuasaan memerintah di sebuah negara atau badan yang tertinggi yang memerintah di sebuah negara; dan
3. pemerintahan, yaitu suatu perbuatan, cara, atau urusan dalam memerintah.

Sedangkan Finer (1971) menjelaskan bahwa istilah *pemerintah* memiliki empat makna. *Pertama*, merujuk pada kegiatan atau proses memerintah (melakukan kontrol dari satu pihak kepada pihak lain). *Kedua*, merujuk pada hal-hal yang terkait dengan negara. *Ketiga*, menjelaskan aktor-aktor yang memiliki kewenangan untuk memerintah. *Keempat*, mengarah pada cara, metode, atau sistem untuk melaksanakan kontrol dari satu pihak kepada pihak lain.

Selanjutnya, Heywood (2004: 65) menjelaskan bahwa institusi pemerintahan berkaitan dengan proses membuat, mengimplementasi, dan menginterpretasi peraturan (regulasi) yang dapat mengikat masyarakat. Suatu pemerintahan memiliki tiga fungsi. *Pertama* adalah fungsi legislasi atau membuat undang-undang (*the making of laws*). *Kedua* adalah fungsi mengeksekusi atau mengimplementasikan undang-undang (*the implementation of laws*). *Ketiga* adalah fungsi menginterpretasikan undang-

“Pemerintahan terdiri dari lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan kolektif bagi masyarakat. Singkatnya, pemerintahan mengacu pada politik tingkat tinggi dalam lembaga-lembaga tersebut” (Hague dan Harrop, 2004: 5).

undang (*the interpretation of laws*). Di negara dengan sistem politik yang demokratis, ketiga fungsi tersebut dijalankan oleh lembaga yang berbeda-beda, yakni

lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Sedangkan di negara dengan sistem politik yang otoriter atau totaliter, ketiga fungsi tersebut dijalankan secara terpusat di bawah tanggung jawab dari lembaga eksekutif.

Ilmuwan politik yang lain, Hague dan Harrop (2004: 5) menjelaskan bahwa kata *pemerintah* lebih populer digunakan untuk menunjuk pada posisi-posisi politik tingkat tinggi, seperti presiden, perdana menteri, dan anggota kabinet. Sedangkan kata *pemerintahan* merujuk pada organisasi-organisasi yang membuat dan mengimplementasikan keputusan atau kebijakan pada sebuah negara. Dalam makna ini, pejabat publik (pegawai negeri), pejabat kehakiman, aparat keamanan, dan yang lainnya dapat dimasukkan sebagai bagian dari pemerintah. Dengan demikian, kata *pemerintahan* dapat diartikan sebagai lembaga-lembaga yang didalamnya terdapat otoritas publik (*public authority*).

Sementara itu, Marsh dan Stoker (1995: 17) menjelaskan bahwa dalam teori politik, penggunaan istilah *pemerintahan* sebenarnya menunjuk pada institusi formal negara yang memiliki kekuasaan koersif yang terlegitimasi.

Pemerintahan ditandai dengan kemampuan membuat keputusan dan menjalankan keputusan-keputusan tersebut, serta secara formal dan institusional memiliki kewajiban menjaga tatanan publik di tingkat nasional dan memfasilitasi tindakan kolektif.

Dari uraian singkat di atas, kita dapat melihat berbagai pendapat para ahli politik dalam mendefinisikan istilah *pemerintahan*. Karena menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, para ahli politik memiliki perbedaan dalam mendefinisikan istilah *pemerintahan*. Namun demikian, berbagai definisi untuk menjelaskan istilah *pemerintahan* tersebut sebenarnya memiliki benang merah. Dari pendapat para ahli di atas, kita dapat merumuskan definisi dari istilah *pemerintahan* yang sekaligus menjadi acuan dalam modul ini.

Pemerintahan adalah sekelompok lembaga negara yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan fungsi negara sebagai pembuat aturan dan melaksanakan aturan-aturan tersebut untuk masyarakat. Dalam arti ini, pemerintahan meliputi lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif.

Definisi dari istilah *pemerintahan* seperti dijelaskan di atas merupakan definisi yang bersifat umum. Namun demikian, dalam artian yang lebih sempit, istilah *pemerintahan* biasanya merujuk pada lembaga pemerintah pusat (kepresidenan, kehakiman, dan kementerian/departemen) atau pun lembaga pemerintah daerah (gubernur, wali kota/bupati), dan dinas-dinas.

Setelah kita memahami pengertian dari istilah *perbandingan* dan *pemerintahan* secara terpisah, selanjutnya kita perlu memahami istilah *perbandingan pemerintahan* sebagai sebuah konsep yang utuh. Secara lebih sederhana, perbandingan pemerintahan dapat diartikan sebagai upaya untuk mengkaji berbagai aspek dari lembaga-lembaga pemerintahan dalam rangka menemukan persamaan dan perbedaan. Secara lebih komprehensif, Mariana, Yuningsih, dan Paskarina (2009: 1.6-1.7) memberikan definisi perbandingan pemerintahan sebagai upaya untuk “menyejajarkan unsur-unsur pemerintahan, baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit, untuk mendapatkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari objek-objek tadi dengan alat perbandingan.”

Dalam studi perbandingan pemerintahan yang menjadi objek kajian untuk diperbandingkan adalah bentuk pemerintahan dari satu negara tertentu dengan negara yang lain. Perbandingan ini dalam rangka mencari berbagai perbedaan dan persamaan. Sebagai contoh, kita dapat membandingkan bentuk

pemerintahan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Secara sederhana, hasil perbandingan tersebut dapat kita lihat di tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Perbandingan Bentuk Pemerintahan di Amerika Serikat dan di Indonesia

	Amerika Serikat	Indonesia
Persamaan	Sistem pemerintahan: Presidensial Kepala negara dan pemerintahan: Presiden Lembaga legislatif: "Dua kamar" (<i>House of Representatives</i> /DPR dan Senat)	Sistem pemerintahan: Presidensial Kepala negara dan pemerintahan: Presiden Lembaga legislatif: "Dua kamar" (DPR dan DPD)
Perbedaan	Bentuk negara: Federal Sistem pemilu presiden: <i>Electoral college</i> Sistem pemilu legislatif: Distrik Sistem kepartaian: Dwi partai	Bentuk negara: Kesatuan Sistem pemilu presiden: Pemilu langsung 2 putaran Sistem pemilu legislatif: Proporsional terbuka Sistem kepartaian: Multipartai

B. RUANG LINGKUP

Asal usul dan perkembangan dari studi perbandingan pemerintahan dapat ditelusuri dari Herodotus dan Aristoteles melalui Bodin dan Montesquieu (Ball, 1993: 8). Studi perbandingan pemerintahan juga bersumber dari pemikiran para tokoh di awal abad ke-20, seperti Woodrow Wilson, James Bryce, dan Carl Friendrich. Menurut Chilcote (2010: 5), studi perbandingan pemerintahan lebih banyak dipengaruhi oleh karya-karya para ahli dari berbagai disiplin, antara lain karya A.R. Radcliffe-Brown dan Bronislaw Malinowski di bidang antropologi, karya Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Max Weber, dan Emile Durkheim di bidang sosiologi dan sosiologi politik, serta karya John M. Keynes, Karl Marx, dan V.I. Lenin di bidang ekonomi dan ekonomi politik.

Pada awalnya, para ilmuwan membedakan antara studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik. Perbandingan pemerintahan sebagai sebuah studi termasuk kajian teoretis atas bentuk-bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga pemerintahan dan termasuk fungsi-fungsinya (proses politik), serta organisasi terkait seperti partai politik dan kelompok penekan (*pressure groups*) dari negara-negara di dunia (Chilcote, 2010: 4).

Saat itu, studi perbandingan pemerintahan belum memberikan perhatian yang lebih pada faktor-faktor formal dan informal yang memengaruhi bekerjanya lembaga negara, termasuk di dalamnya perilaku politik dan etika politik. Blondel (1995) menjelaskan bahwa sebelum Perang Dunia II, ruang lingkup studi perbandingan pemerintahan masih sangat sempit, yaitu sebatas pada studi di seputar konstitusi atau Undang-undang Dasar dan lembaga-lembaga formal negara. Kajian pada saat itu juga lebih banyak diarahkan pada negara-negara maju yang ada di kawasan Eropa dan juga pada negara-negara sedang berkembang di kawasan Amerika Latin.

Sedangkan studi perbandingan politik memiliki cakupan kajian yang lebih luas, tidak hanya membandingkan lembaga formal antarnegara di dunia, tetapi juga lembaga nonformal dan aktivitas politik, seperti pemilu, perilaku memilih, dan faktor-faktor di luar negara yang memengaruhi jalannya politik di sebuah negara. Sebagaimana dijelaskan oleh Franzese JR. (2007: 29), perbandingan politik adalah studi teoritik yang menekankan penelitian pada masalah-masalah budaya politik dan opini publik, institusi-institusi sosial, ekonomi dan politik, dan struktur budaya dengan metode perbandingan yang dilakukan, baik di tingkat internasional dengan membandingkan antarnegara, maupun yang dilakukan di tingkat domestik (satu negara). Penjelasan tentang pengertian perbandingan politik yang lebih sederhana, tetapi memiliki makna luas diberikan oleh Lim (2010: 2), yaitu sebagai kajian yang memberikan seperangkat konseptual dan alat analisis (*analytical tools*) yang dapat digunakan untuk menjawab serangkaian pertanyaan tentang fenomena politik di dunia.

Perkembangan isu-isu kontemporer, baik di negara-negara maju maupun di negara sedang berkembang, mendorong para ilmuwan meletakkan fokus studi perbandingan pemerintahan dan fokus studi perbandingan politik pada hal yang hampir sama. Salah satu faktor penyebab dari perluasan ruang lingkup studi perbandingan pemerintahan ini adalah karena metode yang digunakan dalam studi perbandingan pemerintahan sebenarnya banyak diadopsi dari studi perbandingan politik. Selain itu, studi perbandingan pemerintahan lebih banyak digagas oleh para ilmuwan politik seiring dengan semakin tidak dapat dipisahkannya ilmu pemerintahan dengan ilmu politik.

Menurut Blondel (1995: 10), perkembangan yang sangat pesat tentang ruang lingkup studi perbandingan pemerintahan dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia II. Pada periode ini, perbandingan pemerintahan lebih banyak memfokuskan diri pada lembaga-lembaga pemerintahan, parlemen, partai

politik, dan kelompok penekan. Kemudian, memasuki tahun 1980-an, para ilmuwan telah mengembangkan fokus kajian perbandingan pemerintahan secara lebih luas, yaitu dengan menjadikan norma dan nilai (*values*) yang ada pada masyarakat sebagai bagian dari fokus kajian. Hal ini karena norma dan nilai secara langsung atau tidak langsung berada dan melekat pada karakter dan perilaku lembaga-lembaga pemerintahan (Blondel, 1995: 10).

Secara geografis, wilayah kajian perbandingan pemerintahan kemudian juga semakin luas. Minat para akademisi untuk mempelajari lebih jauh sistem pemerintahan di negara-negara lain semakin meningkat. Runtuhnya kerajaan-kerajaan besar dan gemuruhnya perjuangan kemerdekaan di negara-negara sedang berkembang telah mendorong para akademisi memberikan perhatian lebih besar pada negara-negara baru tersebut. Hal ini memiliki konsekuensi yang sangat besar terhadap studi perbandingan pemerintahan. Menurut Braibanti (dalam Chilcote, 2010: 5), perkembangan studi pemerintahan telah melahirkan lonjakan riset dan melimpahnya dana-dana penelitian yang disediakan oleh negara-negara Barat (khususnya Amerika Serikat dan Eropa Barat) yang menginginkan masukan dari kalangan akademisi untuk menyusun berbagai kebijakan luar negeri termasuk juga berbagai program bantuan untuk negara-negara sedang berkembang.

Box 1.1**Perkembangan Studi Perbandingan Pemerintahan**

Pertumbuhan studi perbandingan pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari fenomena munculnya negara-negara baru di dunia. Pada tahun 1945, tepatnya setelah berakhirnya Perang Dunia II, telah lahir sekitar 70 negara merdeka baru. Negara-negara tersebut termasuk bagian dari negara-negara sedang berkembang yang berjuang menjadi negara merdeka dari kekuasaan negara-negara kolonial.

Beberapa negara baru lahir di Eropa bagian timur setelah perang dunia pertama yang meruntuhkan kerajaan Turki dan Austro-Hungaria. Kelahiran negara-negara baru yang lebih masif terjadi pada akhir tahun 1940 hingga 1960 yang sebagian besar terjadi di wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, dan Afrika Selatan Subsahara. Setelah masa tenang, sejumlah kecil negara-negara kepulauan menjadi independen terutama di Pasifik dan Karibean. Gelombang munculnya negara-negara merdeka berikutnya terjadi di akhir tahun 1980, sebagai hasil dari runtuhnya Uni Soviet dan Yugoslavia. Sampai periode pertengahan 1990-an lebih dari 170 negara telah lahir. Sebagian besar dari mereka memiliki tingkat populasi penduduk yang berjumlah kecil, kecuali dua negara besar (Cina/Tiongkok dan India yang memiliki populasi penduduk seribu juta jiwa) dan sejumlah kecil negara-negara yang berpenduduk padat (Indonesia, Brazil, Rusia, Jepang, Bangladesh, Pakistan, dan Nigeria) yang memiliki penduduk di antara lebih dari 250 juta jiwa dan beberapa lainnya lebih dari 100 juta jiwa.

Munculnya negara-negara baru tersebut telah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap karakter perkembangan studi perbandingan pemerintahan. Tidaklah mengejutkan jika negara-negara di kawasan Eropa Timur dan di kawasan Amerika Selatan menjadi pusat kajian. Dan studi perbandingan pemerintahan kemudian meningkatkan fokusnya pada negara-negara sedang berkembang di wilayah lainnya. Berbagai permasalahan yang terjadi di negara-negara sedang berkembang ini semakin rumit sehingga memerlukan solusi dengan melakukan kajian perbandingan lintas negara (Blondel, 1995: 7).

Ruang lingkup studi perbandingan pemerintahan saat ini telah menjangkau berbagai problematika penyelenggaraan sistem pemerintahan. Ruang lingkup dari kajian perbandingan pemerintahan juga dapat dilakukan di tingkat domestik (nasional) ataupun subnasional (negara bagian, provinsi atau kabupaten/kota). Namun demikian, dalam banyak literatur umumnya kajian perbandingan pemerintahan lebih banyak dilakukan di tingkat nasional (*across nations or states*).

Lebih lanjut, perluasan wilayah kajian perbandingan pemerintahan juga menjangkau kompleksitas dari sistem politik. Setiap negara pasti memiliki sistem politik yang mencerminkan suatu proses di mana kebijakan publik dibuat, dikembangkan, dan diimplementasikan. Menurut Blondel (1995), sistem politik yang menjadi wilayah kajian perbandingan pemerintahan di sini tidak hanya fokus pada lembaga-lembaga negara yang dibentuk oleh konstitusi saja, tetapi juga lembaga-lembaga lain, seperti partai politik dan kelompok-kelompok penekan. Dengan demikian, wilayah kajian perbandingan pemerintahan juga telah memberikan perhatian untuk menjelaskan dan memahami lembaga-lembaga lain di luar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Lebih jauh dari itu, menurut Marsh dan Stoker (2010: 112), ruang lingkup kajian perbandingan pemerintahan juga telah berkembang mengikuti kajian perbandingan politik termasuk pada masalah perilaku aktor yang ada dalam lembaga-lembaga negara. Hal ini tidak terlepas dari keyakinan di sebagian kalangan ilmuwan bahwa yang membentuk tatanan pemerintahan di sebuah negara sebenarnya tidak saja lembaga-lembaga formal yang ada di negara tersebut, melainkan juga perilaku para aktor yang membentuk lembaga formal tersebut.

Box 1.2**Perkembangan Fokus Studi Perbandingan Pemerintahan**

1. Fokus pada wilayah konstitusional yang terjadi hingga kira-kira Perang Dunia II. Konstitusi secara bertahap diperkenalkan di Eropa Timur dan Amerika Latin. Mereka yang memiliki konstitusi dianggap sebagai negara yang memiliki karakteristik sistem politik modern, meskipun sebenarnya mereka telah melakukan penyimpangan konstitusi yang ada.
2. Fokus pada perilaku (behaviorisme) terutama selama tahun 1940-an, 1950-an, dan 1960-an. Behaviorisme awalnya telah sukses dalam studi politik di Amerika Serikat. Hal tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa apa yang penting untuk dipelajari adalah yang terjadi pada realitas bukan yang dinyatakan secara normatif.
3. Fokus pada kelembagaan baru (neoinstitusionalisme) yang dimulai tahun 1970-an dengan keyakinan bahwa tidak semua hal dapat dipahami dengan studi struktur kelembagaan formal.

Sumber: Blondel, (1995: 9)

Blondel (1995) juga menjelaskan bahwa studi perbandingan pemerintahan juga memberikan fokus kajian pada nilai-nilai (*values*) dan norma-norma (*norms*) yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, kedua faktor ini, baik langsung maupun tidak langsung, sebenarnya melekat pada struktur dan perilaku lembaga formal. Selain itu, nilai dan norma adalah yang termasuk mendasari berkembangnya lembaga-lembaga pemerintahan. Bahkan dalam Perspektif Kelembagaan Baru, seperti yang nanti akan kita pelajari yang disebut sebagai lembaga tidak hanya merujuk pada lembaga-lembaga dan aturan-aturan formal dalam sebuah negara, tetapi juga memasukkan lembaga dan aturan informal, misalnya tradisi, adat istiadat, budaya, dan lingkungan (Marsh dan Stoker, 2010: 123).

Meskipun jangkauan dari studi perbandingan pemerintahan telah berkembang, faktor-faktor politik yang mendasari berkembangnya keberadaan lembaga politik di suatu negara beserta fenomena-fenomena politik di dalamnya tidak menjadi bagian dari kajian studi perbandingan pemerintahan. Bagian ini tetap menjadi wilayah studi perbandingan politik. Dengan

demikian, meskipun sama-sama memiliki fokus kajian pada lembaga-lembaga negara, partai politik, kelompok penekan, dan perilaku para aktor di dalam lembaga pemerintahan, studi perbandingan pemerintahan secara metodologis sebenarnya masih dapat dibedakan dengan studi perbandingan politik. Sebagai contoh, ketika kita akan menganalisis perbedaan dan persamaan antara negara berkembang dan negara maju. Studi perbandingan pemerintahan fokus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti di bawah ini.

1. Bagaimana karakteristik dan tipe dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif?
2. Bagaimana karakteristik dan tipe dari partai politik yang ada di tiap-tiap negara tertentu?

Sedangkan studi perbandingan politik akan lebih fokus pada pertanyaan-pertanyaan seperti di bawah ini.

1. Mengapa tipe-tipe institusi politik dan aktivitas politik tertentu dapat eksis di negara tertentu?
2. Apa yang membuat satu negara tertentu memilih sistem demokrasi dan yang lainnya tidak?

Karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berbeda, studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik memiliki jawaban yang berbeda. Selain itu, perbedaan yang paling mendasar antara studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik adalah pada objek kajian masing-masing. Studi perbandingan pemerintahan fokus pada kajian tentang sistem politik yang ada di negara-negara dunia atau pun di antara pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah dalam satu negara. Sistem politik ini mencakup organisasi-organisasi pemerintahan atau struktur sistem politik, seperti kelompok penekan (*pressure groups*), partai politik, legislatif, kabinet, birokrasi, dan kehakiman (Blondel, 1995).

Sedangkan studi perbandingan politik memiliki objek kajian yang fokus pada penjelasan tentang fenomena politik yang berada pada tingkat negara, masyarakat dan sistem politik termasuk di dalamnya, seperti perilaku *elite* politik, kekerasan politik, korupsi politik, studi problem modernisasi dan urbanisasi antarnegara, dan masalah lain yang terkait dengan fenomena politik. Jangkauan studi perbandingan politik juga dapat dilakukan di tingkatan antarnegara di dunia (nasional) atau antarnegara bagian atau pemerintah daerah dalam satu negara (subnasional) (Lim, 2010). Perbedaan yang lain,

studi perbandingan politik dalam perkembangannya juga banyak mengadopsi teori-teori di luar ilmu politik, seperti ilmu ekonomi, sosiologi, ilmu psikologi, ilmu budaya, dan antropologi.

Box 1.3

Perbedaan antara Studi Perbandingan Pemerintahan dan Studi Perbandingan Politik

1. Subjek dari studi perbandingan pemerintahan lebih sempit dan lebih fokus pada sistem politik, sedangkan studi perbandingan politik memiliki subjek kajian lebih luas dan berfokus pada relasi kuasa dan fenomena politik.
2. Studi perbandingan politik lebih banyak dipengaruhi oleh disiplin-disiplin ilmu lain dibandingkan dengan studi perbandingan pemerintahan. Dengan demikian, ragam pendekatan yang digunakan dalam studi perbandingan politik lebih kaya dibandingkan dengan ragam pendekatan dalam studi perbandingan pemerintahan.
3. Adanya perbedaan terkait dengan sifat dasar kajian serta perbedaan manfaat dan tujuan.

Dengan demikian, kita dapat melihat persamaan dan perbedaan antara studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik sebagaimana digambarkan dalam Tabel 1.2. Persamaan dari kedua studi perbandingan tersebut bahwa keduanya fokus pada lembaga-lembaga negara untuk melihat karakter lembaga negara dan relasi antarlembaga negara tersebut. Selain itu, kedua studi tersebut sama-sama mempelajari lembaga-lembaga negara untuk melihat sejauh mana kebijakan-kebijakan negara memengaruhi rakyat. Namun demikian, berbeda dengan studi perbandingan politik, studi perbandingan pemerintahan tidak terlalu fokus pada kajian tentang sejauh mana faktor sosial memengaruhi perilaku politik yang bersifat individual (*individual behaviour*), seperti perilaku *elite-elite* politik dalam lembaga legislatif dan lembaga eksekutif.

Tabel 1.2
Tingkatan Analisis Studi Perbandingan Pemerintahan
dan Studi Perbandingan Politik

Perbandingan Pemerintahan	Perbandingan Politik	Definisi
Fokus pada lembaga	Fokus pada lembaga	Organisasi-organisasi pemerintahan dan relasi antarorganisasi tersebut
-	Fokus pada individu dan masyarakat	Bagaimana faktor sosial mempengaruhi perilaku individual dalam politik
Fokus pada negara	Fokus pada negara	Bagaimana prioritas-prioritas negara berdampak pada masyarakat

Sumber: Dimodifikasi dari Hague dan Harrop, (2004: 75)

Dari uraian di atas, kita dapat melihat bahwa studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik semakin sulit untuk dipisahkan. Pada awalnya, kedua studi tersebut memiliki fokus dan ruang lingkup yang berbeda. Dalam perkembangannya, fokus dan ruang lingkup kedua studi tersebut semakin melebur. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya relasi yang kuat dan akar keilmuan yang sama di antara kedua studi tersebut, yaitu ilmu politik (Ball, 1993: 8). Selain itu, banyaknya isu politik kontemporer yang timbul, baik dalam satu negara maupun antarnegara juga telah melahirkan konsekuensi berupa semakin kaburnya garis pembeda antara studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik.

C. TUJUAN, MANFAAT, DAN RISIKO

Setelah memahami pengertian dan ruang lingkup dari studi perbandingan pemerintahan, diskusi kita lanjutkan ke tujuan, manfaat, dan risiko dalam melakukan studi perbandingan pemerintahan. Apa tujuan melakukan studi ini? Apa signifikansi dan manfaat melakukan perbandingan pemerintahan? Dan apa pula risiko yang perlu dipertimbangkan ketika melakukan studi perbandingan pemerintahan? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab di bagian ini.

1. Tujuan Perbandingan Pemerintahan

Tujuan melakukan studi perbandingan pemerintahan dapat kita bedakan menjadi dua bagian. Tujuan *pertama* adalah untuk menghasilkan teori. Secara khusus, studi perbandingan pemerintahan dapat membantu kita dalam memahami teori dan konsep yang terkait dengan pemerintahan. Dengan demikian, studi perbandingan pemerintahan dapat membantu kita untuk menjawab berbagai pertanyaan besar berikut.

- a. Bagaimana mengembangkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam rangka meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan?
- b. Sistem pemerintahan seperti apa yang sesuai untuk negara sedang berkembang?

Tujuan *kedua* adalah untuk kebutuhan-kebutuhan praktis. Seperti yang dijelaskan oleh Newton dan Deth (2009: 1), setidaknya terdapat tiga alasan akan pentingnya melakukan studi perbandingan pemerintahan. *Pertama*, kita tidak akan dapat memahami negara kita dengan baik tanpa memiliki pengetahuan atas negara-negara lain. Oleh karena itu, untuk memahami negara kita sendiri, kita perlu untuk mempelajari negara-negara lain dengan baik. Dengan memiliki pengetahuan yang baik akan negara-negara lain, kita akan menemukan banyak keunikan dari proses penyelenggaraan dan berjalannya sistem pemerintahan yang kompleks, mulai dari yang gagal hingga yang berhasil. Dengan demikian, studi perbandingan pemerintahan dapat membantu kita untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dari penerapan sistem politik di negara kita sendiri. Selain itu, kita juga dapat memiliki sejumlah ide untuk memperbaiki dan mengembangkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mendorong proses demokratisasi di negara kita sendiri.

Kedua, kita tidak akan dapat memahami negara lain tanpa memiliki pengetahuan tentang lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di dalamnya. Pengetahuan tentang ini cukup penting karena seringkali apa yang dilakukan oleh negara-negara lain, langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap negara kita. Sebagai contoh, negara-negara lain dapat menolak barang-barang yang akan kita impor, menolak untuk bekerja sama dalam perdagangan, menolak untuk melakukan kerja sama dalam masalah keamanan dan menolak untuk membantu menyelesaikan problem ekonomi internasional. Kita perlu tahu, mengapa mereka melakukan hal itu? Dengan mengetahui sistem pemerintahan mereka, kita akan dapat memahami dan menjelaskan tindakan-

tindakan mereka tersebut sehingga kita dapat mengubah situasi menjadi lebih baik. Dengan demikian, studi perbandingan pemerintahan membantu kita untuk memiliki pengetahuan tentang negara-negara lain sehingga kita dapat menyelesaikan dan memperbaiki masalah yang ada.

Ketiga, studi perbandingan pemerintahan juga dapat mendorong kita untuk mempelajari banyak kasus dalam rangka memahami dengan baik pemerintahan di suatu negara. Hal ini penting karena studi hanya pada kasus satu negara saja seringkali tidak menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang negara tersebut. Dalam ilmu pengetahuan, pemahaman yang baik atas sebuah kondisi dapat dicapai jika kita melakukan studi perbandingan. Oleh karena itu, studi perbandingan membantu kita untuk memahami sebuah fenomena yang terjadi di banyak negara.

Dari penjelasan di atas, kita dapat memahami bahwa studi perbandingan pemerintahan perlu dilakukan untuk tujuan teoritis dan tujuan praktis. Keduanya mengarah pada kemampuan kita mengetahui dan memahami berbagai hal yang terkait dengan lembaga pemerintahan di negara lain. Untuk melakukan studi perbandingan pemerintahan, kita memerlukan kerangka konseptual dan alat-alat analisis (*analytical tools*). Seperti yang disampaikan oleh (Lim, 2010: 2), studi perbandingan pemerintahan menyediakan metode atau cara yang sistematis, koheren, dan praktis untuk memahami atas berbagai masalah pemerintahan yang terjadi di dunia.

2. Manfaat Perbandingan Pemerintahan

Kita telah memahami tujuan dari melakukan studi perbandingan pemerintahan. Dari penjelasan di atas, kita sebenarnya telah memiliki gambaran tentang manfaat yang bisa diperoleh ketika kita melakukan studi perbandingan pemerintahan. Secara umum, dengan melakukan studi perbandingan pemerintahan, kita dapat memperkaya pemahaman tentang dunia pemerintahan secara khusus dan dunia politik secara umum di sebuah negara, mengarahkan untuk melakukan klasifikasi-klasifikasi tentang sistem pemerintahan maupun sistem politik, dan bahkan memberikan kesempatan untuk membuat penjelasan dan prediksi-prediksi (Hague dan Harrop, 2004).

Lebih jauh, setidaknya terdapat empat manfaat ketika kita melakukan studi perbandingan pemerintahan. *Pertama*, studi ini tidak hanya membantu kita dalam memahami perkembangan-perkembangan baru dari penyelenggaraan pemerintahan dan tatanan politik yang terjadi di berbagai

negara, tetapi juga membantu kita dalam menjelaskan hubungan-hubungan politik praktis yang terjadi di negara-negara tersebut.

Kedua, studi perbandingan pemerintahan membantu kita untuk melakukan klasifikasi atas sistem politik. Sebagai contoh, dengan melakukan studi perbandingan pemerintahan, kita dapat mengelompokkan konstitusi yang berlaku di berbagai negara ke dalam tipe-tipe yang tertulis dan yang tidak tertulis atau kita dapat memahami berbagai sistem pemerintahan di banyak negara. Kita juga dapat mengelompokkan semua negara ke dalam kategori tertentu, misalnya mana-mana negara di dunia yang menggunakan sistem presidensial dan mana negara-negara yang menggunakan sistem parlementer. Selain itu, kita juga dapat memahami konsekuensi-konsekuensi yang ada dari penerapan tiap-tiap sistem pemerintahan tersebut.

Box 1.4

Manfaat Studi Perbandingan Pemerintahan

1. Memperluas pemahaman dan memberikan pandangan baru tentang negara kita sendiri.
2. Meningkatkan pengetahuan kita tentang proses pemerintahan dan proses politik.
3. Memungkinkan kita untuk membuat hipotesis tentang sistem pemerintahan dan sistem politik.
4. Memberikan potensi untuk membuat prediksi dan kontrol atas jalannya sistem pemerintahan.

Sumber: Diolah dan diadopsi dari Hague dan Harrop, (2004: 69)

Manfaat *ketiga* adalah untuk memahami variasi-variasi sistem pemerintahan dan sistem politik yang tidak hanya untuk kepentingan sistem pemerintahan dan sistem politik itu sendiri, tetapi juga untuk membuat formulasi dan membuat prediksi. Analisis perbandingan memungkinkan kita untuk mengembangkan berbagai pertanyaan, seperti apakah penggunaan sistem dua kamar (bikameral) hanya dapat ditemukan pada negara federal? Bagaimanakah relasi antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem kepartaian multipartai?

Keempat, studi perbandingan pemerintahan tidak hanya memberikan kemampuan pada kita untuk membuat prediksi, tetapi juga memberikan

beberapa pelajaran lintas negara. Dengan mengetahui kelebihan, kelemahan, dan kompleksitas penyelenggaraan sistem pemerintahan di banyak negara, kita dapat mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada negara kita ketika tanda-tanda yang sama terjadi. Sebagai contoh, kita dapat mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan cara melakukan studi perbandingan dengan negara lain. Setelah mengetahui berbagai faktor penyebab yang ada, kita kemudian dapat menyediakan antisipasi sehingga kita dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di negara kita sendiri.

3. Risiko dan Tantangan Studi Perbandingan

Setiap metode penelitian, selain memiliki kelebihan pasti juga memiliki kelemahan dan risiko. Begitupun ketika kita melakukan studi perbandingan pemerintahan. Seperti yang dijelaskan Blondel (1995: 5), seringkali kajian perbandingan pemerintahan dilakukan secara tidak memuaskan dan dengan cara yang dangkal. Cara seperti ini tidak saja terjadi di masa lalu, namun juga terjadi sampai masa sekarang ini. Oleh sebab itu, jika ingin melakukan studi perbandingan, kita harus melakukannya secara mendalam dan sistematis sehingga tidak hanya mempelajari hal-hal yang bersifat umum.

Dalam melakukan studi perbandingan pemerintahan, kita tidak bisa hanya menjelaskan begitu saja profil lembaga-lembaga pemerintahan di sejumlah negara dan kemudian memberikan klaim bahwa deskripsi seperti ini adalah suatu perbandingan. Lebih dari itu, kita harus mengkaji dan meneliti secara bersama-sama berbagai karakteristik dari lembaga-lembaga pemerintahan tersebut dan mencari dalam hal apa saja mereka memiliki persamaan dan perbedaan.

Masih menurut Blondel (1995: 2), seringkali kita tidak membuat perbandingan yang setara atau terlalu jauh perbedaannya. Kita harus ingat bahwa pada dasarnya tidak ada dua negara yang memiliki cukup persamaan untuk diperbandingkan. Setiap negara memiliki sejarah yang berbeda-beda. Sebagai contoh, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, partai politik, dan kelompok-kelompok kepentingan pada satu negara sangat berbeda dengan negara lain sehingga tidak dapat diperbandingkan. Karakter pemerintahan di setiap negara merupakan hasil dari tradisi-tradisi yang telah mengakar kuat di negara tersebut. Kritik terhadap studi perbandingan seperti dijelaskan di atas adalah hal yang wajar. Setiap kajian penelitian pasti tidak terlepas dari sebuah kritik. Namun demikian, kita dapat mengatakan bahwa upaya untuk

melakukan kajian pemerintahan sebenarnya tidak pernah bisa lepas dari metode perbandingan.

Box 1.5

Risiko dalam Perbandingan Pemerintahan

1. Ketika melakukan perbandingan pemerintahan, seorang peneliti dituntut memiliki pengetahuan lebih dari satu sistem politik dan sistem pemerintahan.
2. Fenomena politik yang “sama“ dapat memiliki arti yang berbeda di negara yang berbeda. Hal ini dapat menciptakan kesulitan-kesulitan dalam melakukan perbandingan.
3. Negara-negara yang dipilih untuk dijadikan objek kajian bukanlah sampel yang representatif sehingga membatasi signifikansi temuan.
4. Setiap negara yang diperbandingkan akan berbeda dalam banyak hal yang berarti kita tidak pernah dapat mencapai satu kesimpulan objektif yang dapat mewakili semua komponen (struktur) yang ada dalam sistem pemerintahan.

Sumber: Hague dan Harrop, (2004: 71)

Oleh karena itu, para akademisi yang akan melakukan studi perbandingan dituntut untuk memiliki dasar pengetahuan yang luas atas sejumlah kasus yang ada di tiap-tiap negara yang akan diperbandingkan, seperti soal demografi, ekonomi, dan sosial-budaya. Selain itu, mereka harus memiliki pemahaman atas makna dari tindakan-tindakan yang mendasari sebuah tindakan berdasarkan konvensi negara yang dikaji. Dengan kata lain, mereka yang melakukan studi perbandingan pemerintahan harus memiliki pemahaman yang baik terhadap fenomena politik dan pemerintahan di negara-negara yang menjadi fokus perbandingan. Tidak kalah pentingnya, para akademisi yang akan melakukan perbandingan pemerintahan juga harus memahami bahwa suatu tindakan politik memiliki makna yang berbeda dalam waktu dan tempat yang berbeda pula.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apakah yang dimaksud dengan studi perbandingan pemerintahan?
- 2) Mengapa penting untuk melakukan studi perbandingan pemerintahan?
- 3) Bagaimanakah perkembangan cakupan studi perbandingan pemerintahan pada periode sebelum dan sesudah Perang Dunia II? Jelaskan!
- 4) Apa saja perbedaan fokus analisis dari studi perbandingan pemerintahan dan perbandingan politik? Jelaskan!
- 5) Apa saja tujuan yang hendak dicapai dari studi perbandingan pemerintahan? Jelaskan!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Secara lebih sederhana, perbandingan pemerintahan dapat diartikan sebagai upaya untuk mengkaji aspek-aspek dari pemerintah dalam rangka menemukan persamaan dan perbedaan. Secara lebih komprehensif, perbandingan pemerintahan adalah studi yang berupaya mengkaji unsur-unsur pemerintahan (baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit) dalam rangka untuk menemukan persamaan dan perbedaan baik dalam satu negara, sedikit negara, maupun banyak negara.
- 2) Menurut Newton dan Deth (2009), setidaknya terdapat empat alasan akan urgensi dari studi perbandingan pemerintahan. *Pertama*, untuk dapat memahami negara sendiri dengan baik, dibutuhkan pengetahuan yang cukup tentang banyak negara di dunia sebagai bahan pembanding. *Kedua*, kita tidak akan dapat memahami negara lain tanpa memiliki pengetahuan tentang sejarah, budaya, dan institusi-institusi yang di dalamnya. *Ketiga*, kita tidak akan dapat memahami pemerintahan dan politik negara lain tanpa melakukan studi perbandingan pemerintahan. *Keempat*, studi perbandingan pemerintahan dapat mendorong seseorang mempelajari banyak kasus dalam rangka memahami dengan baik pemerintahan di suatu negara.
- 3) Ruang lingkup studi perbandingan pemerintahan sebelum Perang Dunia II cukup sempit, yaitu sebatas pada studi seputar konstitusi atau Undang-undang Dasar dan lembaga formal negara, seperti eksekutif, legislatif, dan

yudikatif. Berdasarkan cakupan wilayah kajian, studi perbandingan pemerintahan hanya meletakkan fokus kajian sebatas pada negara-negara maju di wilayah Eropa dan Amerika Serikat. Sedangkan ruang lingkup studi perbandingan pemerintahan setelah Perang Dunia II mengalami perluasan, tidak lagi membatasi diri pada lembaga formal negara semata, namun juga memberikan perhatian pada lembaga-lembaga formal di luar negara (seperti partai politik, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan), aspek-aspek dari sistem pemerintahan dan sistem politik, dan termasuk lembaga nonformal yang mencakup norma dan nilai-nilai kehidupan (*the values of life*) yang menjadi prinsip dan fondasi dasar dari budaya politik masyarakat di suatu negara. Selain itu, cakupan wilayah kajian perbandingan pemerintahan juga mengalami perluasan hingga negara-negara di kawasan Asia.

- 4) Yang membedakan antara studi perbandingan pemerintahan dan perbandingan politik pada level analisis adalah terletak pada fokus kajian. Studi perbandingan pemerintahan tidak menjadikan individu dan masyarakat sebagai objek kajian perbandingan yang penting. Ini bertentangan dengan studi perbandingan politik yang menjadikan individu dan masyarakat sebagai salah satu objek kajian yang penting. Dalam artian, faktor-faktor sosial dalam memengaruhi perilaku politik individu tidak dianggap penting sebagai lokus analisis. Karena itu, dalam studi perbandingan pemerintahan, titik tekan analisis diberikan kepada negara dan institusi politik dan/atau organisasi-organisasi pemerintah serta relasi di antaranya.
- 5) Terdapat dua tujuan yang hendak dicapai studi perbandingan pemerintahan, yaitu (a) untuk menghasilkan teori; (b) untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan praktis dalam mendesain pemerintahan yang baik.



RANGKUMAN

Perbandingan pemerintahan adalah studi yang berupaya mengkaji unsur-unsur pemerintahan (baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit) dalam rangka untuk menemukan persamaan dan perbedaan baik dalam satu negara, sedikit negara, maupun banyak negara.

Ruang lingkup studi perbandingan pemerintahan semakin luas, tidak saja mencakup lembaga-lembaga formal, tetapi juga mencakup lembaga-lembaga informal.

Terdapat tiga fase perkembangan fokus kajian perbandingan pemerintahan: (1) fase konstitusional yang terjadi hingga kira-kira Perang Dunia II; (2) fase behavioralisme (perilaku) terutama selama tahun 1940-an, 1950-an, dan 1960-an; dan (3) fase neoinstitusionalisme yang dimulai tahun 1970-an.

Tujuan studi perbandingan pemerintahan, antara lain (1) secara teoritik, untuk membantu para sarjana dalam memahami teori dan konsep yang terkait dengan pemerintahan; dan (2) secara praktis, untuk mengetahui, mempelajari, dan memahami berbagai hal terkait dengan desain pemerintahan dari berbagai negara untuk mencari dan membangun desain sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) dan demokratis (*democratic government*).

Manfaat studi perbandingan pemerintahan adalah (1) membantu dalam memahami perkembangan-perkembangan baru dari penyelenggaraan pemerintahan, tatanan politik, dan hubungan politik praktis yang terjadi di berbagai negara; dan (2) membantu dalam memahami variasi-variasi sistem pemerintahan dan sistem politik untuk membuat formulasi, kontrol, dan prediksi dalam mendesain sistem pemerintahan dan politik yang lebih baik pada suatu negara.

Sedangkan tantangan terbesar dalam studi perbandingan pemerintahan adalah mengharuskan seorang sarjana memiliki dasar pengetahuan yang luas atas sejumlah kasus yang ada di tiap-tiap negara yang akan dikaji.



TES FORMATIF 1 _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) “Sekelompok lembaga negara yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan fungsi negara sebagai pembuat dan melaksanakan aturan” merupakan makna dari istilah
 - A. perintah
 - B. pemerintahan
 - C. kekuasaan
 - D. rezim

- 2) Di bawah ini merupakan fase perkembangan fokus utama studi perbandingan pemerintahan menurut Jean Blondel, *kecuali* fase....
 - A. konstitusional
 - B. behavioralisme
 - C. neo-institusionalisme
 - D. neo-behavioral

- 3) Salah satu objek yang menjadi perhatian dari perbandingan pemerintahan adalah kelompok kepentingan. Yang dimaksud dengan kelompok kepentingan adalah
 - A. kelompok di dalam masyarakat yang diorganisir dalam rangka mencapai kepentingan
 - B. sekelompok manusia di dalam masyarakat yang mengadakan persekutuan yang didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu
 - C. kelompok di dalam masyarakat yang beroperasi dengan mengandalkan jumlah suara dalam pemilihan
 - D. kelompok dalam masyarakat yang beroperasi dengan menggunakan mesin politik birokrasi

- 4) Di bawah ini di antara manfaat studi perbandingan pemerintahan, *kecuali*
 - A. mempersempit pemahaman dan pandangan tentang negara kita sendiri
 - B. meningkatkan pengetahuan tentang proses-proses politik dan pemerintahan
 - C. membantu membuat hipotesis tentang sistem pemerintahan dan sistem politik yang baik
 - D. memberikan potensi untuk membuat prediksi dan kontrol atas jalannya sistem pemerintahan pada suatu negara

- 5) Sistem politik merupakan wilayah kajian studi perbandingan pemerintahan. Di bawah ini merupakan bagian dari sistem politik itu, *kecuali*
 - A. lembaga-lembaga negara yang dibentuk oleh konstitusi
 - B. budaya pada masyarakat adat
 - C. partai politik
 - D. kelompok penekan

- 6) Manfaat studi perbandingan pemerintahan jika dilakukan secara eksplisit dan umum adalah
 - A. meningkatkan penelitian dalam bentuk ide-ide menyangkut suatu organ yang memerintah atau yang diperintah
 - B. meningkatkan konsentrasi penelitian tentang perbandingan tidak hanya pada institusi formal negara, tetapi juga institusi nonformal
 - C. meningkatkan pemahaman global kita terhadap kehidupan pemerintahan
 - D. menentukan perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan antar berbagai sistem pemerintahan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

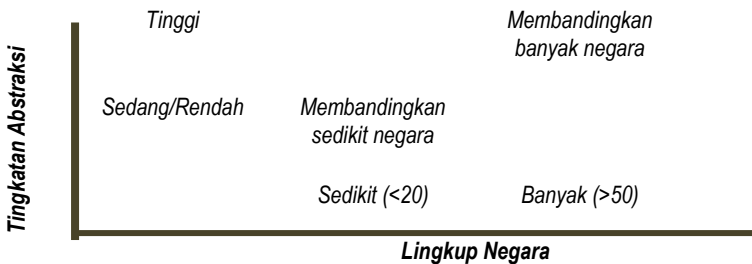
Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Metode Perbandingan Pemerintahan

A. PENDAHULUAN

Studi perbandingan pemerintahan memiliki beragam metode. Setidaknya, terdapat dua metode utama dalam studi perbandingan pemerintahan, yaitu membandingkan banyak negara (*comparing many countries*) atau membandingkan sedikit negara (*comparing a few countries*). Untuk metode yang pertama, kajian dilakukan dengan memperbanyak jumlah negara yang menjadi fokus studi. Tingkatan pengetahuan yang ingin dicapai oleh metode ini adalah abstraksi atau generalisasi sehingga metode ini berorientasi pada kesamaan di antara negara-negara yang menjadi objek perbandingan. Hal ini berbeda dengan metode yang kedua yang hanya fokus pada sedikit negara. Metode yang kedua ini tidak bertujuan untuk melakukan abstraksi atau generalisasi, tetapi bertujuan menggambarkan secara detail kondisi sistem pemerintahan dari negara-negara yang sedang diperbandingkan. Dengan demikian, metode ini lebih berorientasi pada perbedaan yang terjadi di antara negara-negara yang menjadi fokus analisa. Kegiatan Belajar 2 dalam Modul 1 ini mendiskusikan dua metode tersebut. Secara singkat, kedua metode tersebut dapat dipahami melalui Gambar 1.1 di bawah ini.



Sumber: Diadopsi dari Landman, (2003)

Gambar 1.1
Metode Perbandingan

B. STUDI BANYAK NEGARA/KASUS

Studi perbandingan pemerintahan dengan fokus pada banyak negara sering disebut dengan perbandingan N-Besar (*large-N comparison*), di mana N adalah jumlah negara atau kasus yang dijadikan objek penelitian. Secara umum, kemunculan metode ini memiliki kaitan erat dengan lahirnya Revolusi Behavioralisme dalam ilmu sosial. Saat itu, para ilmuwan sosial berusaha untuk membuat generalisasi (penilaian umum) dengan mengambil kasus dari banyak negara (Landman, 2003). Membandingkan banyak negara pada dasarnya adalah berkaitan erat dengan metode eksperimental yang berasal dari ilmu eksakta.

Metode ini menggunakan analisa kuantitatif atas data-data agregat (teknik statistik) yang dikumpulkan dari banyak negara. Jika kita merujuk pada

Pendekatan berorientasi variabel (*variable-oriented approach*) adalah studi perbandingan pemerintahan yang fokus pada tema-tema spesifik (tertentu), pola-pola, dan tendensi-tendensi yang terjadi di banyak negara (Newton dan Deth, 2009).

metode yang dikembangkan oleh Landman (2003), jumlah negara yang diperbandingkan dengan metode ini umumnya lebih dari 20 negara dan bahkan hingga 50 negara. Namun, dalam beberapa studi perbandingan, jumlah negara yang diperbandingkan kurang dari 20 negara (misalnya Lijphart, 1984). Secara umum, tujuan yang hendak dicapai dengan metode N-Besar adalah untuk menjelaskan hubungan-hubungan antarberbagai faktor tertentu. Karena alasan ini, metode N-Besar sering kali disebut dengan pendekatan berorientasi variabel (Newton dan Deth, 2009: 403).

Sebagai contoh, ketika seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara sistem pemerintahan dan kebijakan publik, hal terpenting yang perlu dilakukan adalah memberikan perhatian terhadap proses dan hasil dari pembuatan kebijakan publik tersebut. Sedangkan penjelasan untuk konteks bagaimana pembuatan kebijakan publik tersebut tidak menjadi fokus perhatian. Dengan demikian, jika kita sedang membandingkan banyak negara maka kita tidak fokus pada kondisi sosial budaya yang ada di negara tersebut. Hal itu dikarenakan metode ini meyakini bahwa apabila hubungan tertentu dapat bertahan dalam berbagai konteks, konteks menjadi tidak begitu penting untuk diperhatikan. Adapun tujuan dari penelitian dengan metode N-Besar adalah untuk membuat generalisasi yang kuat dan teliti tentang kehidupan pemerintahan yang berfokus pada kasus-kasus yang cenderung memiliki

kesamaan. Oleh sebab itu, metode ini cenderung tidak meletakkan fokus pada perbedaan yang tajam di antara negara-negara yang menjadi objek penelitian (Marsh dan Stoker, 2010).

1. Asumsi Dasar

Studi perbandingan pemerintahan dengan metode N-Besar memiliki keyakinan bahwa semua negara di dunia dapat dilihat sebagai sebuah kesatuan unit. Informasi-informasi tertentu dari fenomena pemerintahan yang ada di tiap-tiap negara dikumpulkan dan dibandingkan. Karakteristik dan ciri-ciri yang menonjol pada setiap negara meskipun dapat mengalami perubahan setiap waktunya diperlakukan sebagai variasi di antara unit yang ada. Begitu juga perbedaan karakteristik pemerintahan yang ada dalam negara-negara yang menjadi objek perbandingan. Riset dengan metode N-Besar ini cenderung berfokus pada variabel yang bisa dikuantifikasi atau diukur secara numerik. *Box 1.6* di bawah ini menyajikan beberapa studi perbandingan pemerintahan dengan menggunakan metode N-Besar.

Box 1.6

Contoh Studi Perbandingan dengan Metode N-Besar

- a. Studi yang dilakukan oleh Arend Lijphart tentang sistem pemerintahan dan pembuatan kebijakan publik pada 21 negara terutama di Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Eropa Barat. Dalam studi tersebut, Lijphart membuat kesimpulan bahwa terdapat dua pola besar terkait dengan proses pembuatan kebijakan publik di negara-negara yang telah demokratis, yaitu pola mayoritas dan pola konsensus. Studi ini kemudian dipublikasikan dengan judul "*Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-one Countries*" pada tahun 1984.
- b. Studi ini kemudian dilanjutkan oleh Lijphart dengan studi lain masih dengan tema yang sama yang kemudian diterbitkan dalam buku berjudul "*Patterns of Democracy: Governments Forms and Performance in Thirty-six Countries*" pada tahun 1999. Riset ini mempertajam temuan sebelumnya. *Pertama*, adanya dua model besar demokrasi, yaitu Model Westminster dan Model Konsensus. *Kedua*, adanya dua model kabinet, yaitu Model Konsentrasi Kekuasaan Eksekutif dan Model Pembagian Kekuasaan Eksekutif. *Ketiga*, adanya

dua model parlemen, Model Konsentrasi Kekuasaan dan Model Pembilahan Kekuasaan. *Keempat*, adanya dua model dalam relasi lembaga antara eksekutif dan legislatif, yaitu Model Dominasi dan Model Pembagian Kekuasaan. *Kelima*, adanya dua model dalam pembagian kekuasaan negara, yaitu Federal-Kesatuan dan Sentralisasi-Desentralisasi. *Keenam*, adanya dua model dalam proses pembuatan konstitusi, yaitu amandemen dan *yudisial review*. Juga beberapa temuan lain terkait dengan sistem kepartaian, sistem pemilu, dan kelompok kepentingan.

- c. Studi yang dilakukan oleh Seymour Martin Lipset yang kemudian dipublikasikan dengan judul "*Political Man*" pada tahun 1960. Studi ini menggunakan serangkaian indikator kuantitatif pembangunan ekonomi dan sosial dalam melihat derajat demokrasi di sebuah negara. Hasil penelitian Lipset menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan erat antara tingkat pembangunan ekonomi dan sosial yang tinggi terhadap stabilitas demokrasi (Marsh dan Stoker, 2010: 303 dan 310).
- d. Studi Lipset tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Larry Diamond yang hasil studinya dipublikasikan dengan judul "*Economic Development and Democracy Revisited*" pada tahun 1992. Dalam risetnya tersebut, Diamond menggunakan variabel dan indikator yang berbeda dengan yang digunakan oleh Lipset. Variabel penjelasnya adalah ukuran kemajuan materi secara luas, yaitu indeks pembangunan manusia yang dikeluarkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP). Sedangkan variabel campurannya terdiri dari tingkat melek huruf orang dewasa, angka harapan hidup, dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Untuk variabel terikat, Diamond menggantikan dikotomi demokrasi/kediktatoran yang digunakan Lipset dengan sebuah variabel ordinal kedemokratisan yang diukur dengan skala tujuh angka yang diambil dari survei nasional *Freedom House* terhadap hak dan kebebasan di dunia. Melalui pendekatan ini, Diamond dapat menunjukkan korelasi antara pembangunan dan demokrasi (Marsh dan Stoker, 2010: 310-311).

Asumsi dasar dari studi perbandingan dengan metode N-Besar ini bahwa berbagai peristiwa dan yang ada di negara-negara di dunia dapat dijelaskan, dibandingkan, dan dianalisis. Namun demikian, analisa dari data dalam perbandingan pemerintahan ini dilakukan atas sampel yang dikumpulkan dari

berbagai negara dalam kurun waktu tertentu. Cara ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel dari data yang dikumpulkan dan apakah hubungan tersebut ada dalam setiap negara yang dijadikan objek penelitian. Penarikan kesimpulan didasarkan pada sejumlah sampel (beberapa negara selama kurun waktu tertentu) dan populasi (semua negara yang dijadikan objek) dengan menggunakan analisis statistik (Landman, 2003).

2. Kelebihan dan Kekurangan

Jika melihat asumsi dasar yang digunakan, studi perbandingan pemerintahan dengan menggunakan metode N-Besar ini memiliki banyak kekuatan. Menurut Landman (2003: 27), penggunaan metode ini setidaknya memiliki 4 kekuatan sebagai berikut.

- a. Metode ini dapat mengatur dan mengendalikan penjelasan-penjelasan yang bersifat saling bertentangan (*rival explanations*) dan dapat mengontrol faktor-faktor yang dapat bercampur aduk sehingga metode ini dapat menghasilkan penjelasan yang jernih.
- b. Metode ini dapat membuat, mengembangkan, dan menguji teori besar yang melintasi berbagai kondisi dari waktu dan negara yang berbeda.
- c. Metode ini memiliki kemampuan untuk membuat kesimpulan yang kuat.
- d. Metode ini memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi apa yang disebut sebagai negara-negara yang menyimpang (*deviant countries*).

Namun demikian, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan. Newton dan Deth (2009) berargumen bahwa apa yang dianggap menjadi kekuatan dari metode ini sebenarnya dapat berubah menjadi kelemahan yang serius. Menurut mereka, tidak semua hal yang penting dan secara teoretis menarik dapat dengan mudah dikuantifikasi (dianalisis dengan data-data statistik/angka-angka). Penggunaan data kuantitatif yang memiliki standar yang sama sebenarnya justru dapat membawa risiko bahwa data yang tersedia dapat mendikte pertanyaan penelitian. Selain itu, di banyak negara, data yang ada sangat dipertanyakan kredibilitas dan ketersediaannya. Dengan demikian, data statistik di satu negara bisa jadi tidak sebanding dengan yang ada di negara-negara lain.

Lebih jauh, dalam metode ini banyak teknik statistik yang didasarkan pada korelasi sehingga hanya mengukur hubungan antarvariabel. Hal ini sangat problematis. Korelasi antarvariabel hanya dapat menjelaskan sesuatu jika dua

ukuran berubah secara bersamaan dan bagaimana ukuran itu berubah. Namun demikian, ukuran-ukuran tersebut tidak dapat menjelaskan apakah satu variabel kausal (penyebab) memiliki kaitan dengan yang lain. Sebagai contoh, kita ingin melihat relasi antara pembangunan ekonomi dan demokrasi. Dengan metode N-Besar ini, kita akan dapat memberikan penjelasan bahwa pembangunan ekonomi dapat menyebabkan demokrasi. Namun, kita tidak dapat menjelaskan hubungan sebaliknya, yaitu demokrasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi atau kita tidak dapat menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi dan demokrasi sebenarnya merupakan konsekuensi dari faktor ketiga, seperti budaya masyarakat setempat atau semangat dari agama yang dianut oleh masyarakat di sebuah negara. Kesulitan lain dari metode ini adalah adanya persyaratan utama untuk menguasai statistik dan matematika dengan baik. Oleh karena itu, mereka yang tidak memiliki kemampuan baik dalam kedua ilmu ini akan mengalami kesulitan.

Hopkin (2010) juga mencatat empat kelemahan utama dari metode ini. *Pertama*, ketersediaan data yang biasanya tidak memadainya. Sebagai contoh, jika kita ingin melakukan kajian tentang dampak sistem pemerintahan terhadap efektivitas pembuatan kebijakan publik. Kita perlu menyadari bahwa tidak semua negara memiliki data tentang kondisi efektivitas pembuatan kebijakan publik di negara mereka. *Kedua*, pemilihan kasus justru dikendalikan oleh ketersediaan data sehingga metode ini tidak dapat menjangkau perbedaan yang ada di setiap negara. *Ketiga*, terkait dengan keandalan data. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Lipset dan Diamond, seperti yang dikutip di atas, mengukur keberhasilan tingkat ekonomi suatu negara dengan melihat pada kondisi Produk Domestik Bruto (PDB). Cara pengukuran ini, menurut Hopkin (2010) sebenarnya sangat bias. Sebagai contoh, cara tersebut gagal dalam memotret produksi ekonomi yang tidak termoneterisasi, seperti kerja rumah tangga, ekonomi gelap, pekerja dibidang pertanian, dan pekerja di laut sebagai nelayan. Selain itu, pada umumnya ukuran yang dijadikan standar adalah mata uang dolar Amerika sehingga dapat terdistorsi oleh fluktuasi pasar devisa. *Keempat*, metode ini cenderung tidak tepat dalam pembuatan konseptualisasi. Hopkin memberikan contoh tentang perdebatan korelasi pembangunan ekonomi dan demokrasi, di mana kekaburan konsep dan ketidakkonsistenan dalam menggunakan kedua konsep tersebut dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak valid. Seringkali pembangunan ekonomi diukur secara tidak akurat. Bahkan, seringkali dalam memberikan makna pembangunan ekonomi sendiri juga tidak jelas.

Box 1.7**Contoh Melakukan Perbandingan Pemerintahan dengan Metode N-Besar**

Kita hendak mencari persamaan atau perbedaan sistem pemerintahan di negara-negara Asia Tenggara. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah dengan menguji hubungan antarkomponen atau lembaga dalam sistem pemerintahan yang ada di masing-masing negara yang sedang diperbandingkan. Lembaga-lembaga itu, seperti eksekutif (kementerian dan kepresidenan/kabinet), legislatif, yudikatif, partai politik, dan kelompok kepentingan. Lembaga-lembaga itu bisa kita posisikan sebagai variabel yang tentu memiliki kesalinghubungan (interkoneksi) satu sama lain.

Upaya untuk mencari relasi antarlembaga dalam sistem tersebut dapat dilakukan dengan menganalisis kewenangan dan fungsi dari masing-masing lembaga yang biasanya diatur dalam konstitusi atau undang-undang. Mengetahui fungsi dari masing-masing lembaga dalam sistem pemerintahan di suatu negara adalah langkah yang amat penting dan utama karena tanpa mengetahui fungsi-fungsi dari masing-masing lembaga tersebut maka akan sulit untuk dapat mengetahui persamaan atau perbedaan sistem pemerintahan di satu negara dengan negara-negara lainnya.

Langkah berikut yang perlu dilakukan adalah menguji dan menganalisis sejauh mana relasi antarlembaga pemerintahan yang diatur dalam konstitusi atau undang-undang yang ada di masing-masing negara yang sedang diperbandingkan. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana lembaga-lembaga tersebut menjalankan fungsinya dalam realitas empiris. Dengan cara seperti ini, kita dapat membuat persamaan dan perbedaan dari masing-masing sistem pemerintahan yang ada di negara-negara di kawasan Asia Tenggara tersebut.

Kelemahan-kelemahan penggunaan metode N-Besar ini kemudian telah menggeser fokus kajian hanya pada sejumlah kecil negara. Fokus kajian pun juga semakin menyempit pada kasus-kasus tertentu. Semakin banyak literatur kontemporer yang memuat studi perbandingan pemerintahan mulai bergeser ke arah melihat perbedaan dari negara-negara yang dibandingkan dengan jumlah yang lebih sedikit.

C. STUDI SEDIKIT NEGARA/KASUS

Metode N-Kecil (*small-N comparison*) meletakkan perhatian utama pada perbandingan atas sedikit negara. Kemunculan metode ini menjadi pilihan alternatif untuk memberi solusi atas keterbatasan pada metode N-Besar. Studi perbandingan pemerintahan dengan menggunakan metode N-Kecil berusaha untuk membandingkan secara intensif atas aspek-aspek dalam sistem pemerintahan yang ada di sejumlah kecil negara. Dalam metode ini, kita dapat memilih negara-negara yang menjadi objek kajian dalam rangka menjelaskan berbagai kemungkinan.

Menurut Newton dan Deth (2009), studi perbandingan pemerintahan dengan metode N-Kecil memiliki beberapa ciri umum berikut.

1. Metode ini fokus pada hubungan-hubungan antarlembaga yang memiliki kesamaan dalam sejumlah kecil negara dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Beberapa studi juga menggunakan metode penelitian campuran yang memadukan metode kuantitatif dan kualitatif (*mixed method*).
2. Metode ini berusaha melihat relasi dan proses politik dalam sistem pemerintahan yang sangat rumit dan kompleks dengan berdasarkan pada prinsip *trial and error* serta sebuah pemahaman intuitif atas masyarakat dan politik. Sebagai contoh, untuk menganalisis stabilitas sistem pemerintahan di suatu negara, studi perbandingan pemerintahan dengan metode N-Kecil ini berusaha menganalisis hubungan antarlembaga pemerintahan, antara lembaga pemerintahan dan berbagai kelompok kepentingan serta partai politik atau hubungan antara pemerintah dan partai politik.
3. Metode N-Kecil berusaha mengelola berbagai informasi khusus yang tersedia tanpa adanya tendensi untuk melakukan generalisasi atau standarisasi atas berbagai informasi dan data yang dikumpulkan.

Metode N-Kecil adalah perbandingan atas sedikit negara, biasanya didasarkan pada analisa sistematis yang mendalam dan pengetahuan yang detail atas negara-negara tersebut (Newton and Deth, 2009).

Analisis perbandingan kualitatif adalah perbandingan sistematis atas sedikit kasus dengan menggunakan teknik yang spesifik untuk membangun dan menguji generalisasi-generalisasi (Newton dan Deth, 2009).

Adapun tujuan utama dari metode N-Kecil adalah untuk memahami proses-proses politik dan pemerintahan yang aktual dari sejumlah kecil negara. Karenanya, metode ini juga dikenal sebagai sebuah metode yang berorientasi pada kasus (Newton dan Deth, 2009). Selain itu, metode ini juga dikenal sebagai metode yang berorientasi untuk membandingkan kasus-kasus yang berbeda dari satu negara dengan negara-negara lain (Hague dan Harrop, 2004).

Hal yang seringkali menjadi pertanyaan ketika menggunakan metode ini adalah berapa idealnya batasan negara-negara yang menjadi obyek kajian. Menurut Newton dan Deth (2009), tidak ada batasan yang jelas terkait dengan jumlah negara yang menjadi obyek kajian sehingga metode N-Kecil ini berbeda dengan metode N-Besar. Namun demikian, pada umumnya, studi perbandingan pemerintahan dengan metode N-Kecil melibatkan tidak lebih dari lima atau enam negara. Lebih jauh, Landman (2003: 68) menjelaskan bahwa jumlah negara yang menjadi objek kajian sangat bergantung pada empat hal, yaitu:

1. pertanyaan riset yang diajukan;
2. pengalaman *regional* (kewilayahan), sejarah, linguistik, dan budaya dari peneliti itu sendiri;
3. tingkat penggunaan metodologi;
4. keterbatasan terhadap sumber penelitian.

1. Asumsi Dasar

Metode N-Kecil memiliki asumsi yang cenderung sama dengan metode N-Besar. Sebagai contoh, kedua metode ini yakin bahwa negara-negara yang ada di dunia ini sebenarnya merupakan unit-unit yang menyediakan informasi dan data yang dapat diperbandingkan (*comparable data*). Dalam beberapa kajian, metode N-Kecil juga menggunakan metode kuantitatif. Dengan demikian, karakteristik dari negara-negara yang memiliki kesamaan dapat diukur. Selain itu, metode ini juga dapat menjelaskan berbagai peristiwa (*event*) dan fenomena yang unik di setiap negara.

Namun demikian, kedua metode ini memiliki perbedaan yang jelas. Berbeda dengan metode N-Besar, metode N-Kecil meletakkan perhatian pada konteks yang melingkupi setiap kasus yang ada di tiap-tiap negara, memberikan fokus yang mendalam terhadap varian-varian yang ada di dalam setiap negara, memiliki tingkat generalisasi yang rendah, dan menggunakan analisis kualitatif terhadap berbagai informasi sosial dan politik yang berbeda.

Lebih jauh, Landman (2003) menjelaskan karakter utama dari metode N-Kecil ini. *Pertama*, metode ini berorientasi pada kasus (*case-oriented*), dan tidak berorientasi pada variabel (*variable-oriented*). Hal ini dikarenakan fokus analisa pada metode N-Kecil lebih diarahkan pada peristiwa khusus dan pada variasi dalam perkembangan pemerintahan dalam setiap negara (variabel-variabel yang bersifat mikro). *Kedua*, metode ini melakukan deskripsi atas beberapa negara secara lebih intensif. Kajian yang menggunakan metode N-Kecil tidak dilakukan secara meluas di banyak negara, namun lebih berorientasi pada durasi waktu yang panjang dan berubah-ubah yang terjadi pada tingkatan sub-nasional di sejumlah kecil negara. Dengan demikian, metode ini memungkinkan seorang peneliti lebih mendalam dalam pengambilan sampel. Dengan kata lain, karena memberikan batasan pada jumlah negara yang diperbandingkan, metode ini tidak berorientasi pada generalisasi yang luas. Namun demikian, metode ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam atas karakteristik dan fenomena di suatu negara yang menjadi subjek analisa.

Ketiga, metode N-Kecil berusaha membuat penjelasan yang mendalam atas sebuah kasus. Konsekuensinya, metode ini tidak dapat digunakan untuk melakukan abstraksi dan generalisasi. Perbandingan dilakukan hanya untuk konsep yang memiliki kesesuaian di negara-negara yang diperbandingkan. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan tidak dapat digunakan secara luas di setiap negara, kecuali bagi negara-negara yang memiliki kesamaan karakteristik (*similar features*).

Keempat, jika metode N-Besar yang bersifat kuantitatif sangat analitis dan cenderung dapat melakukan abstraksi atau generalisasi atas fenomena tertentu, metode N-Kecil yang bersifat kualitatif cenderung melihat pentingnya konteks yang bekerja di lingkungan masing-masing negara dan mengkaji berbagai kasus dengan lebih mendalam. Contoh sederhana dari studi perbandingan pemerintahan dengan metode N-Kecil dapat diilustrasikan dalam *Box 1.8* di bawah ini.

Box 1.8**Contoh Kasus Studi Perbandingan Pemerintahan
dengan Metode N-Kecil**

Seorang sarjana ingin melakukan studi perbandingan dengan metode N-Kecil antara sistem pemerintahan di Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda dalam rangka mengetahui persamaan dan perbedaan sejauh mana sistem pemerintahan dijalankan. Sarjana itu tidak akan mengambil banyak variabel untuk dijadikan objek analisisnya. Dia hanya akan fokus untuk menganalisis beberapa lembaga dalam sistem pemerintahan, seperti proses pengambilan kebijakan di pemerintahan dan sejauh mana relasi kekuasaan yang terjadi dalam proses pengambilan kebijakan tersebut antara lembaga eksekutif, legislatif, partai politik, dan kelompok-kelompok kepentingan, seperti NGO, organisasi bisnis, dan organisasi lainnya. Namun demikian, dia mungkin juga akan menganalisis budaya politik di masing-masing negara karena faktor tersebut memengaruhi karakter para pembuat kebijakan publik di masing-masing negara.

2. Pemilihan Kasus dan Desain Riset

Metode N-Kecil dibagi ke dalam dua tipe desain, yaitu desain sistem yang paling mirip (*most similar systems design* atau MSSD) dan desain sistem yang paling berbeda (*most different system design* atau MDSD). Meskipun sama-sama fokus pada sedikit negara sebagai objek perbandingan, kedua desain ini memiliki perbedaan.

MSSD berusaha mengidentifikasi fenomena yang berbeda pada negara-negara yang memiliki karakteristik yang sama dan faktor penjelas kuncinya. MSSD berusaha memberikan penjelasan mengapa pada negara-negara yang memiliki karakter yang sama ternyata justru memiliki fenomena yang berbeda. Tidak sedikit ilmuwan politik yang menggunakan MSSD. Sebagai contoh adalah studi yang dilakukan oleh Kudrle (1981), di mana ilmuwan tersebut berusaha menjelaskan perbedaan mekanisme dan dampak dalam program jaminan sosial di empat negara (Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Selandia Baru), padahal sistem jaminan asuransi kesehatan di ke-empat negara ini sebenarnya sama.

MSSD sebenarnya sangat identik dengan studi-studi kewilayahan (*area studies*). Studi kewilayahan biasanya menjelaskan bahwa terdapat sesuatu yang secara inheren berbeda pada negara-negara yang berada pada wilayah tertentu, seperti wilayah Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Perbedaan itu bisa terjadi karena faktor sejarah, bahasa, agama, politik, dan budaya. Dengan demikian, para peneliti yang melakukan studi-studi kewilayahan pada dasarnya menggunakan MSSD. Mereka fokus pada fenomena yang berbeda dari negara-negara yang memiliki karakteristik yang hampir sama (Landman, 2003: 71).

Pendekatan yang berorientasi pada kasus adalah perbandingan pada negara-negara tertentu yang fokus pada topik, pola, dan kecenderungan di negara-negara tersebut (Landman, 2003).

Peneliti MSSD dituntut memiliki kemampuan bahasa dan untuk melakukan riset lapangan yang intensif agar dapat memahami konteks wilayah dari kasus yang diangkat. Biasanya, seorang peneliti membutuhkan waktu beberapa tahun untuk mempelajari berbagai hal yang terkait dengan karakter negara-negara yang sedang diperbandingkan, misalnya bahasa. Hal ini dikarenakan setiap negara meskipun dalam satu wilayah memiliki karakter dialektika yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian dengan pendekatan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk memahami kondisi-kondisi yang ada.

Box 1.9**Contoh Studi dengan Metode MSSD**

Jones (1995) membandingkan pengaturan kelembagaan (*institutional arrangement*) pada negara-negara di kawasan Amerika Latin. Negara-negara di kawasan tersebut tidak hanya memiliki memiliki budaya dan warisan sejarah yang sama, tetapi juga memiliki kesamaan sistem presidensialisme. Sedangkan Collier (1991) membandingkan pengalaman dari delapan negara di kawasan Amerika Latin untuk menemukan patahan-patahan sejarah (*critical junctures*) yang memengaruhi perkembangan gerakan buruh. Peneliti lain, Barattton dan van der Walle (1997) dan Lindbrerg (2006) membandingkan negara-negara yang ada di kawasan sub-Sahara Afrika untuk menjelaskan lahir dan perkembangan demokrasi di wilayah ini.

Sumber: Landman, (2003)

Sedangkan MDSD berusaha mengidentifikasi fenomena yang sama pada negara-negara yang memiliki karakteristik yang berbeda dan faktor penjelas kuncinya. MDSD berusaha menjelaskan faktor kunci dari kesamaan fenomena pada negara-negara yang memiliki karakter berbeda. Dalam konteks ini, kita dapat melihat bahwa MDSD sebenarnya memungkinkan seorang peneliti untuk fokus pada elemen-elemen khusus dari masing-masing negara yang menjadi objek kajian (Landman, 2003). Keyakinan yang mendasari MDSD bahwa jika sebuah hubungan antara dua variabel atau lebih di sebuah negara ternyata berlaku juga untuk negara-negara lain maka kita memiliki landasan yang kuat untuk menyatakan bahwa ada hubungan sebab-akibat antarvariabel di sebuah kawasan. Dengan cara seperti ini, MDSD dapat mengeliminasi variabel makro dan dapat membuat generalisasi yang valid (Hopkin, 2010).

Dari penjelasan di atas, kita dapat melihat dengan jelas perbedaan antara MSSD dan MDSD. Yang *pertama* lebih memberikan penekanan pada perbedaan yang ada pada negara-negara yang secara umum memiliki karakter yang sama. Yang *kedua* memberikan titik tekan pada persamaan di negara-negara yang sebenarnya memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk membantu memahami perbedaan di antara kedua desain sistem ini dapat disimak pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3
Most Similar System Design (MSSD) dan Most Different System Design (MDSO)

	MSSD <i>Persamaan</i>			MDSO <i>Perbedaan</i>		
	<i>Negara 1</i>	<i>Negara 2</i>	<i>Negara ϕ</i>	<i>Negara 1</i>	<i>Negara 2</i>	<i>Negara ϕ</i>
Karakter	a	a	A	a	d	g
	b	b	B	b	e	h
	c	c	C	c	f	i
Faktor penjas kunci	x	x	bukan x	x	x	x
Fenomena yang dijelaskan	y	y	bukan y	y	y	y

Sumber: diadopsi dari Landman, (2003: 71)

Tabel di atas menjelaskan perbedaan antara MSSD dan MDSO. Untuk MSSD, negara-negara yang sedang diperbandingkan memiliki karakteristik dasar yang sama (a, b, dan c). Negara-negara tersebut memiliki persamaan dalam faktor penjas kunci (x) dan fenomena yang dijelaskan. Sebaliknya, jika negara-negara tersebut tidak memiliki kesamaan dalam faktor penjas kunci maka negara-negara tersebut juga tidak memiliki kesamaan dalam fenomena yang akan dijelaskan (y). Dengan demikian, ada atau tidaknya faktor penjas kunci menentukan ada tidaknya fenomena yang akan dijelaskan. Inilah yang dimaksud dengan “metode perbedaannya Mill” (*Mill’s method of difference*).

Sedangkan bagian MDSO yang berada di bagian tabel sebelah kanan menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki karakteristik dasar yang berbeda (a sampai i), tetapi memiliki faktor penjas kunci yang sama (x). Selain itu, negara-negara ini juga memiliki fenomena yang akan dijelaskan yang sama (y). Dalam metode ini, fenomena yang akan dijelaskan memiliki kesamaan karena adanya faktor penjas kunci yang sama di semua negara (x). Inilah yang disebut sebagai “metode persetujuannya Mill” (*Mill’s method of agreement*).

Dengan demikian, dalam kedua sistem tersebut, keberadaan dari faktor penjas kunci (x) dikaitkan dengan keberadaan dari fenomena yang akan dijelaskan (y). Beberapa ilmuwan berargumen bahwa x sebenarnya yang menyebabkan y. Sampai di sini, tampak jelas bahwa perbedaan di antara kedua

desain sistem tersebut berkaitan dengan soal memilih negara-negara yang akan diperbandingkan karena pada dasarnya dua sistem ini (MSSD dan MDSD) adalah strategi untuk memilih negara-negara yang akan diperbandingkan dengan metode N-Kecil. Penjelasan di atas menunjukkan kepada kita akan perbedaan sederhana antara dua metode tersebut. Perbedaan utama terletak pada fokus kajian, di mana yang satu fokus pada sejumlah variabel yang sama dan yang lain fokus pada sejumlah variabel yang berbeda. Untuk MSSD terdapat sejumlah variabel yang tidak berlaku sama di masing-masing negara dengan karakter yang sama. Sebaliknya, untuk MDSD terdapat sejumlah variabel yang umum yang berlaku di negara-negara dengan karakter yang berbeda.

3. Kelebihan dan Kekurangan

Studi perbandingan dengan menggunakan metode N-Kecil menawarkan alat analisis yang sangat kuat dalam melakukan studi perbandingan pemerintahan. Metode ini juga dapat menjawab beberapa pertanyaan riset dengan teliti dan meyakinkan. Dengan memilih sedikit negara atau kasus untuk diperbandingkan, proses penelitian akan menemukan gambaran umum dari kasus yang diperbandingkan. Lebih dari itu, proses penelitian juga akan menemukan pemahaman yang mendalam atas kasus-kasus yang diperbandingkan, mulai dari sejarah, konteks dan budaya yang melingkupinya. Bahkan, proses penelitian akan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang sangat penting dalam memberi kontribusi atas sebuah fenomena.

Akan tetapi, metode ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah terkait dengan cakupan jumlah dan pilihan negara yang akan diperbandingkan. Jika dibandingkan dengan metode N-Besar, metode N-Kecil ini lebih memiliki masalah terkait dengan bias pemilihan negara yang akan menjadi objek kajian. Pilihan pada negara atau kasus yang dianggap sama dan yang dianggap paling berbeda dapat muncul pada waktu yang berubah-ubah (tergantung dengan kriteria pilihan). Selain itu, menurut Hopkin (2010) studi perbandingan pemerintahan dengan metode N-Kecil yang menggunakan analisis kualitatif seringkali dianggap oleh para ilmuwan sebagai sebuah kajian yang kurang akurat jika dibandingkan dengan metode N-Besar yang menggunakan analisis statistik.

“Method of difference” adalah penelitian perbandingan pada negara-negara yang memiliki karakter yang sama, namun negara-negara tersebut memiliki perbedaan variabel penjelas (Hopkin, 2010).



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apa saja perbedaan dan persamaan metode N-Besar dan metode N-Kecil dalam studi perbandingan pemerintahan? Jelaskan!
- 2) Apa saja tujuan dasar penelitian yang menggunakan metode N-Besar dalam studi perbandingan pemerintahan? Jelaskan!
- 3) Apa saja ciri-ciri umum dari metode N-Kecil dalam studi perbandingan pemerintahan? Jelaskan!
- 4) Menurut banyak sarjana perbandingan, penggunaan metode N-Besar dalam studi perbandingan pemerintahan memiliki banyak kekuatan. Jelaskan kekuatan-kekuatan tersebut!
- 5) Apa saja kriteria yang menjadi ukuran dalam menentukan jumlah negara yang dijadikan objek kajian dalam studi perbandingan pemerintahan dengan metode N-Kecil? Jelaskan!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Perbedaan metode N-Besar dan N-Kecil dalam studi perbandingan pemerintahan berada pada fokus kajian, pendekatan, dan metode pengumpulan data. Di mana metode N-Besar lebih memberikan perhatian untuk menjelaskan hubungan antarberbagai faktor dan variabel tertentu guna membangun generalisasi yang kuat sehingga dalam metode N-Besar, penjelasan terkait konteks eksisnya sistem pemerintahan tertentu di suatu negara tidak terlalu menjadi fokus perhatian. Metode ini yakin bahwa apabila hubungan tertentu dapat bertahan dalam berbagai konteks maka konteks menjadi tidak begitu penting untuk diperhatikan. Dalam hal pengumpulan data, metode N-Besar lebih mengedepankan metode kuantitatif yang fokus pada variabel yang bisa diukur atau diukur secara numerik. Sedangkan metode N-Kecil lebih memberikan perhatian untuk menjelaskan konteks yang melingkupi setiap kasus yang ada di tiap-tiap negara, memberikan fokus yang mendalam terhadap varian-varian yang ada di dalam setiap negara, memiliki tingkat generalisasi yang rendah, dan menggunakan analisis kualitatif terhadap berbagai informasi sosial dan politik yang berbeda. Adapun persamaan antara metode N-

Besar dan N-Kecil terletak pada asumsi dasar perbandingan yang menyatakan bahwa negara-negara di dunia ini sebenarnya merupakan unit-unit yang menyediakan informasi dan data yang dapat diperbandingkan.

- 2) Studi perbandingan pemerintahan dengan metode N-Kecil memiliki beberapa ciri umum sebagai berikut. (1) Metode ini fokus pada hubungan-hubungan politik dan proses-proses politik yang memiliki kesamaan dalam sejumlah kecil negara dengan menggunakan metode dan fakta-fakta penyelidikan kualitatif. Beberapa studi juga menggunakan metode perbandingan dari kuantitatif dan kualitatif (*mix method*). (2) Metode ini berusaha mendedah hubungan-hubungan dan proses-proses yang sangat rumit dengan berdasarkan pada prinsip *trial and error* serta sebuah pemahaman intuitif atas masyarakat dan politik. Sebagai contoh, studi ini berusaha mengeksplorasi hubungan antarberbagai ajaran agama selain agama Kristen Protestan dengan demokrasi. (3) Metode ini berusaha mengelola berbagai informasi khusus yang tersedia tanpa adanya tendensi untuk melakukan pembakuan atas berbagai informasi dan data tersebut (*without any need to standardise*).
- 3) Tujuan dari penelitian dengan metode N-Besar adalah untuk membuat generalisasi yang kuat dan teliti tentang kehidupan pemerintahan yang berfokus pada kasus-kasus yang cenderung memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, metode ini cenderung tidak meletakkan fokus pada perbedaan yang tajam di antara negara-negara yang menjadi objek penelitian.
- 4) Menurut Landman (2003), penggunaan metode N-Besar setidaknya memiliki 4 kekuatan, yaitu: *pertama*, metode ini dapat mengatur dan mengendalikan penjelasan-penjelasan yang bersifat saling bertentangan (*rival explanations*) dan dapat mengontrol faktor-faktor yang dapat bercampur aduk. *Kedua*, metode ini dapat membuat, mengembangkan, dan menguji teori besar yang melintasi berbagai kondisi dari waktu dan negara yang berbeda. *Ketiga*, metode ini memiliki kemampuan untuk membuat kesimpulan yang kuat. *Keempat*, metode ini memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi apa yang disebut sebagai negara-negara yang menyimpang (*deviant countries*).
- 5) Menurut Landman (2003) bahwa jumlah negara yang menjadi objek kajian sangat bergantung pada empat hal, yaitu: *pertama*, pertanyaan riset yang diajukan dalam penelitian yang akan dilakukan; *kedua*, pengalaman *regional* (wilayah), sejarah, linguistik, dan budaya dari peneliti itu sendiri;

ketiga, tingkat penggunaan metodologi; dan *keempat*, keterbatasan terhadap sumber penelitian.



RANGKUMAN

Dalam studi perbandingan pemerintahan terdapat dua metode utama yang lazim digunakan, yaitu (1) membandingkan banyak negara (*comparing many countries*) atau biasa disebut metode N-Besar, dan (2) membandingkan sedikit negara (*comparing a few countries*) atau biasa disebut N-Kecil.

Metode perbandingan N-Besar adalah upaya untuk membuat studi perbandingan dengan memperbanyak negara sebagai fokus kajian. Tingkatan pengetahuan yang ingin dicapai oleh metode ini adalah abstraksi atau generalisasi sehingga metode ini berorientasi pada kesamaan di antara negara-negara yang menjadi objek penelitian. Metode penelitian yang lazim digunakan adalah kuantitatif. Karena itu, riset dengan metode N-Besar ini cenderung berfokus pada variabel yang bisa dikuantifikasi atau diukur secara numerik.

Metode perbandingan N-Besar memiliki asumsi dasar bahwa semua negara di dunia dapat dilihat sebagai sebuah kesatuan unit. Oleh karena itu, peristiwa dan fakta-fakta yang ada di dunia menunjukkan bagian-bagian tertentu yang dapat dijelaskan, dibandingkan, dan dianalisis. Namun demikian, analisa dari data dalam perbandingan pemerintahan ini dilakukan atas sampel yang dikumpulkan dari berbagai negara dalam kurun waktu tertentu.

Metode perbandingan N-Kecil adalah upaya membuat studi perbandingan yang meletakkan fokus kajian pada sedikit negara. Tingkat pengetahuan yang ingin dicapai metode ini adalah untuk menggambarkan secara detail kondisi dari negara-negara yang sedang diperbandingkan dan memahami proses-proses aktual dalam sejumlah kecil negara.

Metode N-Kecil memiliki asumsi dasar yang cenderung sama dengan metode N-Besar. Namun, kedua metode ini memiliki perbedaan yang jelas. Berbeda dengan metode N-Besar, metode N-kecil meletakkan perhatian pada konteks yang melingkupi setiap kasus yang ada di tiap-tiap negara, memberikan fokus yang mendalam terhadap varian-varian yang ada di dalam setiap negara, memiliki tingkat generalisasi yang rendah, dan menggunakan analisis kualitatif terhadap berbagai informasi sosial dan politik yang berbeda. Namun demikian, dalam beberapa kajian, metode N-Kecil juga dibantu dengan metode kuantitatif sehingga menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif (metode campuran).

**TES FORMATIF 2**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Di bawah ini di antara kelemahan utama dari metode N-Besar dalam studi perbandingan pemerintahan, *kecuali*
 - A. metode yang cenderung tidak tepat dalam membuat konseptualisasi
 - B. kesediaan data yang sering tidak memadai
 - C. keandalan data yang dipertanyakan dan lemah
 - D. tidak dapat membuat generalisasi atas masalah-masalah yang diperbandingkan

- 2) Metode N-Besar dalam studi perbandingan pemerintahan adalah upaya melakukan perbandingan dengan mengumpulkan banyak negara. Kemunculan metode ini berkaitan erat dengan
 - A. adanya pembaharuan dalam pendekatan *institutionalis*
 - B. lahirnya revolusi behavioralisme dalam ilmu sosial
 - C. munculnya pendekatan *rational choice*
 - D. lahirnya pendekatan *institutionalism* dalam ilmu sosial

- 3) Manfaat metode N-Besar dalam studi perbandingan pemerintahan adalah
 - A. metode ini dapat membuat, mengembangkan, dan menguji teori besar yang melintasi berbagai kondisi dari waktu dan negara yang berbeda
 - B. metode ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang sangat penting dalam memberi kontribusi atas fenomena khusus
 - C. mendapatkan pemahaman khusus dan mendetail atas kasus yang diperbandingkan.
 - D. menawarkan alat analisis yang mendalam dan sangat kuat dalam upaya untuk melakukan studi perbandingan pemerintahan.

- 4) Di bawah ini adalah karakter utama dari metode N-Kecil dalam studi perbandingan pemerintahan, *kecuali*
 - A. berorientasi pada kasus dan tidak berorientasi pada variabel
 - B. melakukan deskripsi atas sedikit negara secara lebih intensif
 - C. berusaha membuat penjelasan yang mendalam atas sebuah kasus
 - D. bersifat kuantitatif dan cenderung tidak melihat pentingnya konteks yang bekerja di lingkungan masing-masing negara

- 5) Metode N-Kecil dalam studi perbandingan pemerintahan dibagi ke dalam dua tipe, yaitu desain sistem
- yang berbeda dan memiliki sedikit kesamaan
 - yang sama namun tak serupa
 - yang paling mirip dan yang paling berbeda
 - kualitatif dan kuantitatif
- 6) Menurut Landman, yang dimaksud dengan “perbandingan pada negara-negara tertentu yang fokus pada topik, pola, dan kecenderungan di negara-negara tersebut” adalah pendekatan yang
- berorientasi pada kasus
 - menitikberatkan pada banyak negara
 - mencoba mencari perbedaan dan persamaan dari sistem pemerintahan
 - berorientasi pada isu-isu global

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B Pemerintahan adalah sekelompok lembaga negara yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan fungsi negara sebagai pembuat aturan dan melaksanakan aturan-aturan tersebut untuk masyarakat. Dalam arti ini maka pemerintahan meliputi lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif.
- 2) D Menurut Jean Blondel terdapat tiga fase perkembangan fokus utama studi perbandingan pemerintahan: fase konstitusional, fase behavioralisme, dan fase neoinstitusionalisme.
- 3) B Kelompok kepentingan adalah kelompok manusia di dalam masyarakat yang mengadakan persekutuan yang didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu.
- 4) A Menurut Hague dan Harrop (2004) setidaknya terdapat empat manfaat yang dapat diperoleh dari studi perbandingan pemerintahan, yaitu *pertama* memperluas pemahaman dan memberikan pandangan baru tentang negara kita sendiri; *kedua*, meningkatkan pengetahuan kita tentang proses pemerintahan dan proses politik; *ketiga*, memungkinkan kita untuk membuat hipotesis tentang sistem pemerintahan dan sistem politik; dan *keempat*, memberikan potensi untuk membuat prediksi dan kontrol atas jalannya sistem pemerintahan.
- 5) B Menurut Blondel (1995), sistem politik yang menjadi wilayah kajian perbandingan pemerintahan di sini tidak hanya fokus pada lembaga-lembaga negara yang dibentuk oleh konstitusi saja, tetapi juga lembaga-lembaga lain, seperti partai politik dan kelompok-kelompok penekan.
- 6) C Yang menjadi manfaat dari studi perbandingan pemerintahan jika studi tersebut dilakukan secara eksplisit dan umum adalah dapat meningkatkan pemahaman global kita terhadap kehidupan pemerintahan.

Tes Formatif 2

- 1) D Menurut Hopkin (2010) terdapat empat kelemahan utama dari metode N-Besar dalam studi perbandingan pemerintahan. *Pertama*, ketersediaan data yang biasanya tidak memadainya. *Kedua*, pemilihan kasus justru dikendalikan oleh ketersediaan data sehingga metode ini tidak dapat menjangkau perbedaan yang ada

- di setiap negara. *Ketiga*, terkait dengan keandalan data. *Keempat*, metode ini cenderung tidak tepat dalam pembuatan konseptualisasi.
- 2) B Secara umum kemunculan metode N-Besar dalam studi perbandingan pemerintahan memiliki keterkaitan erat dengan lahirnya revolusi behavioralisme.
 - 3) A Di antara manfaat metode N-Besar dalam studi perbandingan pemerintahan adalah dapat membuat, mengembangkan, dan menguji teori besar yang melintasi berbagai kondisi dari waktu dan negara yang berbeda.
 - 4) D Metode yang bersifat kuantitatif dan cenderung tidak melihat pentingnya konteks yang bekerja di lingkungan masing-masing negara merupakan karakter utama metode N-Besar, bukan N-Kecil. Menurut Landman (2003) karakter utama dari metode N-Kecil dalam studi perbandingan pemerintahan adalah *pertama*, metode ini berorientasi pada kasus (*case-oriented*) dan tidak berorientasi pada variabel (*variable-oriented*). *Kedua*, metode ini melakukan deskripsi atas beberapa negara secara lebih intensif. *Ketiga*, metode perbandingan sedikit negara berusaha untuk membuat penjelasan yang mendalam atas sebuah kasus. *Keempat*, metode N-Kecil yang bersifat kualitatif cenderung melihat pentingnya konteks yang bekerja di lingkungan masing-masing negara dan mengkaji berbagai kasus dengan lebih mendalam.
 - 5) C Metode N-Kecil dibagi ke dalam dua tipe desain, yaitu desain sistem yang paling mirip (*most similar systems design* atau MSSD) dan desain sistem yang paling berbeda (*most different system design* atau MDSD).
 - 6) A Menurut Landman (2003) bahwa pendekatan yang berorientasi pada kasus adalah perbandingan pada negara-negara tertentu yang fokus pada topik, pola, dan kecenderungan di negara-negara tersebut.

Daftar Pustaka

- Anderson, B. (2002). *Hantu Komparasi: Nasionalisme, Asia Tenggara, dan Dunia*. Yogyakarta: Kalam.
- Ball, A.R. (1993). *Modern Politics and Government*. London: Macmillan Press.
- Blondel, J. (1995). *Comparative Government An Introduction*. Cambridge: University Press.
- Budiman, A. (1996). *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chilcote, R.H. (2010). *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Clark, W.R., Golder, M., & Golder, S.N. (2013). *Principles of Comparative Politics*. Singapore: SAGE Publication.
- Franzese, J.R., Robert, J. (2007). “Multicausality, Context-Conditionally, and Endogeneity” dalam Carles Boix & Susan C. Stokes. *The Oxford Handbook of Comparative Politics*. United States: Oxford University Press.
- Hague, R. & Martin, H. (2004). *Comparative Government and Politics: An Introduction*. New York: Palgrave Macmillan.
- Heywood, A. (2004). *Political Theory: An Introduction*. New York: Palgrave Macmillan.
- Hopkin, J. (2010). “Metode Komparatif” dalam David Marsh & Gerry Stoker, *Teori, dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusamedia.

- Kudrle, R.T. (1981). The implications of foreign dental coverage for U.S. National Health Insurance. *Journal of Health Politics, Policy and Law*. Vol. 5, No. 4.
- Landman, T. (2003). *Issue and Methods in Comparative Politics: An Introduction*. New York: Routledge.
- Lim, T. (2010). *Doing Comparative Politics: An Introduction to Approach and Issues*. USA: Lynne Rienner Publishers.
- Lipjhart, A. (1984). *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-one Countries*. New Haven: Yale University Press.
- Lipjhart, A. (1999). *Patterns of Democracy: Governments Forms and Performance in Thirty-six Countries*. New Haven: Yale University Press.
- Mariana, D., Neneng, Y. Y., & Caroline, P. (2009). *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Marsh, D. & Gerry, S. (2010). *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusamedia.
- Newton, K. & Jan, W. Van Deth. (2009). *Foundations of Comparative Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pamuji, S. (1983). *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Stoker, G. (1998). Governance as Theory: Five Propositions. *International Social Science Journal*, Vol. 50, Issue 155, Pages17-28.